

**URGENSI LARANGAN PENJABAT GUBERNUR
DALAM MELAKUKAN MUTASI PEGAWAI**

SKRIPSI



OLEH :

**ALOYSIA YULIANTI ADI
19300021**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**URGENSI LARANGAN PENJABAT GUBERNUR
DALAM MELAKUKAN MUTASI PEGAWAI**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA**



OLEH:

**ALOYSIA YULIANTI ADI
19300021**

SURABAYA, 9 JANUARI 2023

MENGESAHKAN,

PEMBIMBING I

SETO CAHYONO, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING II

Dr. PENI JATI SETYOWATI, S.H., M.H.

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

URGENSI LARANGAN PENJABAT GUBERNUR DALAM MELAKUKAN MUTASI PEGAWAI

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN OLEH

OLEH :

ALOYSIA YULIANTI ADI

19300021

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN PENGUJI PADA TANGGAL 9 JANUARI 2023

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. SUDAHNAN, S.H., M.Hum.

(KETUA)

1.

2. NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA)

2.

3. SETO CAHYONO, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA)

3.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aloysia Yulianti Adi
NPM : 19300021
Alamat : Jl. Dukuh Kupang XVII No. 40a, Kel. Dukuh
Kupang, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya
No. Telp. (HP) : 081236445315

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “URGENSI LARANGAN PENJABAT GUBERNUR DALAM MELAKUKAN MUTASI PEGAWAI” adalah murni gagasan yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 9 Januari 2023

Yang menyatakan,


ALOYSIA YULIANTI ADI
NPM: 19300021

MOTTO

“Setiap pilihan pasti mempunyai alur yang berbeda, tetapi yang harus diingat bahwa berproses dengan rasa syukurlah yang akan membangun benteng karaktermu”

Aloysia Yulianti Adi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-nya, sehingga skripsi yang berjudul “URGENSI LARANGAN PENJABAT GUBERNUR DALAM MELAKUKAN MUTASI PEGAWAI” dapat diselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih untuk segala dukungan, motivasi, arahan, dan semangat kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggasari, S.H., M.Hum. dan sekaligus selaku Dosen Wali yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Seto Cahyono, S.H., M.Hum. dan Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberi memberi pengarahan dan pengetahuan selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. H. Freddy Poernomo, S.H. M.H. selaku dosen yang turut membantu dalam memberikan penjelasan terhadap skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan pengetahuan ilmu hukum dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Orang tua dan segenap keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dukungan serta semangat.
7. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang memberikan saya pengetahuan tentang ilmu hukum dan pengalaman berorganisasi.

8. James Wihelmus Alexandro Pawo Usman yang telah memberikan dukungan dan semangat.
9. Trinita Yunita Pogon asebagai sahabat suportif saya yang selalu memberikan semangat yang luar biasa.
10. Teman-teman seperjuangan saya Monissa, Amin, Marcelo, Desy, Stevani, Riki, Fahmi, Icha Vania, dan masih banyak lagi yang selalu menemani dan membantu selama masa perkuliahan.
11. Teman-teman serantau NTT Surabaya Milan, Jessy, Ejen, Narti Vira, Enjel, Santi yang saling mendukung dalam menjalani masa perkuliahan,
12. Kaka Tingkat saya mas Dimas, Fransvaldo, dan Devon yang turut membantu dalam proses keorganisasian maupun semasa perkuliahan.

Dengan demikian saya mengucapkan terima kasih dan saya sebagai memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi kita semua.

Hormat saya,

Penulis



Aloysia Yulianti Adi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
<i>ABTRACT</i>	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah	7
III. Tujuan Penelitian	7
IV. Manfaat Penelitian	7
V. Kerangka Konseptual	8
VI. Metode Penelitian.....	22
VII. Pertanggung jawaban Sistematika.....	28
BAB II URGENSI LARANGAN PENJABAT GUBERNUR DALAM MELAKUKAN MUTASI PEGAWAI.....	30
I. Larangan Penjabat Gubernur dalam melakukan Mutasi Pegawai....	30
II. Landasan Larangan Mutasi Pegawai oleh Penjabat Gubernur.....	48
III. Tujuan Dari Larangan Penjabat Gubernur Dalam Mutasi Pegawai	60
BAB III IMPLIKASI HUKUM DARI LARANGAN KEPADA PENJABAT GUBERNUR DALAM MELAKUKAN MUTASI PEGAWAI.....	62
I. Keabsahan Larangan Mutasi Pegawai Oleh Penjabat Gubernur	62
II. Dampak-Dampak Yang Ditimbulkan Dari Larangan Mutasi Pegawai.....	76

III. Sanksi Hukum apabila terjadi Pelanggaran Mutasi Pegawai	79
BAB IV PENUTUP	83
I. Kesimpulan.....	83
II. Saran.....	84
DAFTAR BACAAN	

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Urgensi larangan Penjabat Gubernur dalam melakukan mutasi pegawai, hal tersebut dilatarbelakangi oleh munculnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 821/5492/SJ yang membolehkan larangan kepada Penjabat Gubernur dalam melakukan mutasi pegawai. Penelitian ini bertujuan Pertama, untuk menjelaskan Urgensi larangan Penjabat Gubernur dalam melakukan mutasi pegawai. Kedua, menjelaskan implikasi hukum dari larangan Penjabat Gubernur dalam mutasi pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif yang menggunakan analisa pada peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum.

Keputusan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 821/5492/SJ perihal membolehkan Penjabat Gubernur dalam larangan mutasi pegawai tanpa harus mengajukan permohonan terlebih dahulu tersebut dianggap sebagai bagian dari *Freies ermesen*. Namun, sebenarnya keputusan tersebut sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap suatu larangan. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut dapat dinyatakan cacat secara formil maupun materiil. Urgensi larangan Penjabat Gubernur dalam melakukan mutasi pegawai tersebut adalah hal tersebut dapat menguntungkan bagi calon pilkada atau petahana yang akan menjalankan Pilkada karena terdapat motif politik.

Pembolehan atas larangan mutasi pegawai tersebut menjadi tidak sah menurut hukum dan dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan sederatan perundang-undangan, serta hal ini akan berdampak terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan dapat mempengaruhi keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak optimal. Dalam larangan tersebut, terdapat sanksi apabila Penjabat Gubernur yang melanggar ketentuan mutasi pegawai hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No, 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu pada Pasal 71 ayat (5) dan (6) yaitu akan dicabut jabatannya dan tentunya pembatalan dari pencalonan pilkada.

Kata Kunci: Urgensi, Larangan, Mutasi, Penjabat Gubernur

ABTRACT

This research is entitled The urgency of prohibiting Acting Governors from carrying out employee transfers, this is motivated by the emergence of Minister of Home Affairs Circular Letter No. 821/5492/SJ which allows a prohibition on the Acting Governor in carrying out employee transfers. This study aims first, to explain the urgency of prohibiting acting governors from carrying out employee transfers. Second, explaining the legal implications of the Acting Governor's prohibition on employee transfers. The method used in this study uses the Normative Legal Research method which uses an analysis of statutory regulations and legal doctrines.

The decision of the Minister of Home Affairs through Circular Letter of the Minister of Home Affairs No. 821/5492/SJ regarding allowing the Acting Governor to prohibit the transfer of officers without having to submit an application first is considered as part of discretion. However, actually the decision is a form of non-compliance with a ban. The Circular Letter of the Minister of Home Affairs can be declared defective both formally and materially. The urgency of prohibiting the Acting Governor from carrying out employee mutations is that this can benefit the Pilkada candidates or incumbents who will run the Pilkada because there are political motives.

Allowance for the ban on employee transfers becomes illegal according to law and is declared null and void because it is contrary to a series of laws and regulations, and this will have an impact on the Election of Regional Heads and can affect the sustainability of sub-optimal regional administration. In this prohibition, there are sanctions if the Acting Governor violates the provisions on employee transfers, this is regulated in Law no. 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law no. 1 of 2015 Concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 1 of 2014 Concerning the Election of Governors, Regents and Mayors to Become Laws, namely in Article 71 paragraphs (5) and (6), which means that their position will be revoked and of course the cancellation of the regional election candidacy.

Keywords: Urgency, Prohibition, Movement, Acting Governor